



Studi Kritis Peran Ormas Islam Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia

Abdul Hakim Pohan^{1*}, Ahmad Aziz², Elfi Putra³, Zulmuqim⁴, Fauzana Masyudi⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*Corresponding Author, E-mail : 2320010019@uinib.ac.id

Abstract

Islam is a religion of rahmatan lil'alamin, which cannot only be seen from ritual or theological aspects alone. Islamic organizations were born and founded to answer the needs of the people in the religious sector. This research wants to know the role of mass organizations in the field of developing Islamic education in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative through library research, with content analysis. The results of the research show that Islamic organizations were founded with the noble aim of responding to concerns and serving the needs of the community in the religious aspect. To explore more deeply religious behavior in a social context requires at least three approaches, namely a social approach, a religious approach and a psychological approach. The initial emergence of Islamic mass organizations can be grouped into three reasons, namely: first, Islamic da'wah; second, education; and third, economic empowerment of the people. These three reasons were the background to the Islamic movement at that time, because political affairs were supervised and controlled by the Dutch East Indies colonialists. The birth of Islamic religious organizations began with the existence of Jami'at Al Khair in Jakarta (1905), then Al Irsyad (1911), a mass organization of Arab descent in Indonesia, the development of Jami'at Al Khair, then the Islamic Trade Company emerged (1911), and next Muhammadiyah was born in Yogyakarta (1912), Islamic Association (1923) in Bandung, Nahdatul Ulama in Surabaya (1926), Al Jami'atul Washliyah in Medan (1930) and Al Ittihadiyah in Medan (1935).

Keyword : Islamic Educational Institutions, Religious Organizations, Islamic Mass Organizations

Abstrak

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin, yang tidak hanya bisa dilihat dari aspek ritual maupun teologis semata. Ormas Islam lahir dan didirikan untuk menjawab kebutuhan umat pada bidang keberagamaan. Penelitian ini ingin mengetahui peran ormas pada bidang pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ormas Islam didirikan dengan tujuan mulia yaitu menjawab keresahan dan melayani kebutuhan masyarakat pada aspek keberagamaan. Untuk mengeksplor lebih dalam tentang perilaku keberagamaan dalam konteks sosial setidaknya membutuhkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosial, pendekatan agama, dan pendekatan psikologi. Awal munculnya ormas Islam dapat dikelompokkan pada tiga alasan yaitu: pertama, dakwah Islami; kedua, pendidikan; dan ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga alasan inilah yang melatarbelakangi pergerakan Islam saat itu, sebab urusan politik diawasi dan dikontrol oleh penjajah Hindia Belanda. Kelahiran organisasi keagamaan Islam diawali dengan adanya Jami'at Al Khair di Jakarta (1905), kemudian Al Irsyad (1911), merupakan ormas keturunan Arab di Indonesia pengembangan dari Jami'at Al Khair, seterusnya muncul Syarikat Dagang Islam (1911), dan berikutnya lahir Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (1923) di Bandung, Nahdatul Ulama di Surabaya (1926), Al Jami'atul Washliyah di Medan (1930) dan Al Ittihadiyah di Medan (1935).

Kata Kunci : Lembaga Pendidikan Islam, Organisasi Keagamaan, Ormas Islam

PENDAHULUAN

Sejarah diartikan sebagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. di Indonesia banyak ulama Nusantara dan tokoh yang berjuang membentuk organisasi baik organisasi politik, keagamaan hingga organisasi nasab keturunan. Selanjutnya perkembangan organisasi keberagamaan sangat dipengaruhi aspek budaya dan sosial politik. Secara politik, respon masyarakat pada penguasa penjajah, seperti Belanda dan Jepang, memicu lahirnya ormas-ormas. Implikasi ini semakin menegaskan lahirnya jati diri dan identitas sebagai sebuah bangsa yang beragama terutama pada aspek pelayanan masyarakat yang cenderung tidak dipedulikan oleh pemerintah. Bangkitnya gerakan organisasi Islam tidak sekedar faktor kebetulan semata melainkan berdasarkan ideologi kebangsaan dan tanggung jawab yang terbangun (Basit et al., 2023).

Munculnya organisasi-organisasi Islam di Indonesia banyak dilatar belakangi karena mulai terbentuknya jiwa nasionalisme dan patriotisme sebagai tindak lanjut dari banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat banyak mengalami kemunduran dan kebodohan massal akibat eksploitasi politik dari penjajah yaitu Belanda. Langkah pertama diwujudkan dalam bentuk berorganisasi.

Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, kelahiran ormas Islam bisa dipetakan dari tiga hal: pertama, dakwah Islamiyah; kedua, pengembangan pendidikan; dan ketiga, penguatan ekonomi masyarakat. Ketiga hal ini menonjol pada masa itu karena pergerakan Islam lebih memungkinkan untuk dilakukan, sebab bidang politik dikontrol dan dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Awal abad 20 merupakan momen kesadaran umat Islam Indonesia, untuk perlunya berorganisasi, bahwa perjuangan umat harus diwujudkan dalam bentuk kebersamaan dan tidak dengan bersendirinya saja. Mulai tumbuh organisasi Islam diawali dengan munculnya Jami'at Al Khair di Jakarta (1905), merupakan organisasi keturunan Arab. Kemudian muncul Al Irsyad (1911), pengembangan dari Jami'at Al Khair. Lalu muncul SDI (Syarikat Dagang Islam) (1911), selanjutnya Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (1923) di Bandung, Nahdatul Ulama di Surabaya (1926), Al Jami'atul Washliyah di Medan (1930) dan Al Ittihadiyah Medan (1935). Selain dari itu masih banyak lagi organisasi-organisasi lain yang tersebar di Indonesia.

Para pemimpin pergerakan nasional dengan kesadaran penuh ingin mengubah keterbelakangan rakyat Indonesia. Mereka menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam agenda perjuangannya. Kesadaran itulah yang membuat para pemimpin Nasional memperjuangkan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah study literature (book survey) yaitu menelusuri dan menelaah bahan referensi dengan membaca dan mencatat serta mengolah dan mengkaji bukubuku yang relevan dengan fokus pembahasan. Adapun tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data pustaka, membaca, serta mengelola bahan penelitian, menganalisis data kemudian menarik kesimpulan. Analisis data menggunakan metode content analysis yang bersifat deskriptif analisis yaitu mengkaji permasalahan secara mendalam dengan mengemukakan analisa dan menggambarkan secara rinci terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ormas Islam Dalam Pengembangan Pendidikan Di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan umat Islam mayoritas dan jumlah ormas terbanyak di dunia. Peran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sangat diperlukan dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Peran itu telah dilakukan oleh organisasi keagamaan diantaranya Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis dan Mathla'ul Anwar. Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 di Kauman Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan, Mathla'ul Anwar lahir pada 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. NU lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya Jawa Timur oleh KH Hasyim Asy'ari.

Integrasi ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Islam yang diasuh oleh organisasi-organisasi Islam telah berlangsung sejak kelahiran organisasi tersebut. Muhammadiyah telah mendirikan sekolah-sekolah umum yang berbasis agama. (Steenbrink, 1986). Pada tahun 1923, di Yogyakarta telah didirikan empat sekolah dasar Muhammadiyah, dan sudah mulai mempersiapkan mendirikan sekolah HIS dan sekolah pendidikan guru. Demikian pula Muhammadiyah juga sibuk mendirikan sekolah di luar Yogyakarta, misalnya mendirikan HIS di Jakarta. Pada tahun 1932, Muhammadiyah di Jawa Tengah telah mempunyai 165 sekolah model gubernemen, di samping 68 sekolah agama yang pada umumnya dibuka pada siang dan sore. (Steenbrink, 1986).

Persatuan Umat Islam (PUI) didirikan oleh Halim Sanusi di Majalengka pada tahun 1917. Halim Sanusi dalam kongres tersebut mengusulkan agar didirikan sebuah lembaga pendidikan, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum dan juga dilengkapi dengan pekerjaan tangan, perdagangan dan pertanian, sesuai dengan bakat masing-masing. (Noer, 1980).

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada tanggal 12 September tahun 1923 oleh H. Zamzam dan H. Muhammad Yunus. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir. Persis sejak awal pendiriannya lebih menitikberatkan pada dakwah dan pendidikan Islam. Persis juga mengembangkan Sekolah Taman Kanak-Kanak, HIS, MULO, sekolah guru dan pesantren.

Di kalangan Nahdatul Ulama, dimasukkannya mata pelajaran umum ke Pesantren Tebuireng oleh Moh. Ilyas atas persetujuan K.H. Hasyim Asy'ary, yakni menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah dan bahasa Melayu. Kontribusi Ormas Islam dalam Muwujudkan Umat Islam Berkeunggulan dilakukan oleh Al Jamiyatul Washliyah, yang mendapat inspirasi untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum dan memasukkan mata pelajaran umum ke madrasah adalah ketika tokoh-tokoh organisasi ini berkunjung ke Sumatera Barat.

Pada tahun 1934, Al Washliyah mengirim utusan ke Sumatera Barat untuk meninjau pendidikan di sana, sebab Sumatera Barat pada waktu itu adalah pusat modernisasi pendidikan di Indonesia. Para delegasi yang terdiri dari M. Arsyad Thalib Lubis, Udin Syamudin dan Nukman Sulaiman sangat terkesan dengan sistem pendidikan di Sumatera Barat tersebut, maka dibawalah masalah itu ke sidang Konferensi Cabang Al Washliyah, sehingga diputuskanlah untuk mendirikan sekolah umum berbasis agama Islam dan volkschool (sekolah dasar) dan bahasa Belanda pun dimasukkan pula ke dalam kurikulum.

Al Ittihadiyah yang juga lahir di Medan pada tahun 1935, juga memasukkan mata pelajaran umum ke madrasah-madrasah Al Ittihadiyah, pada tingkat ibtidaiyah mata pelajaran umum yang diajarkan adalah berhitung, bahasa Indonesia, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah. Pada tingkat tsanawiyah: bahasa Indonesia, bahasa Inggris ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah, ilmu alam (Ulang Tahun ke 25: 1960: 119 - 123). Beberapa

organisasi Islam yang disebutkan terdahulu, merupakan sampel dari organisasi-organisasi Islam lainnya yang dalam tulisan ini dapat diungkapkan bahwa organisasi-organisasi Islam tersebut telah memprogramkan integrasi keilmuan di lembaga-lembaga pendidikan yang mereka asuh. Walaupun integrasi ilmu itu baru pada tahap mencampurkan atau memprogram pengetahuan dan agama di madrasah / sekolah yang diasuh oleh organisasi tersebut. Integrasi ilmu itu semakin hari semakin dirasakan urgensinya terutama di era global saat ini, yang bercirikan sebagai berikut:

A. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak pada bidang pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 H, atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912. Ahmad Dahlan bernama kecil Muhammad Darwisy lahir pada tahun 1868 di Kampung Kauman Yogyakarta dan meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1923 dalam usia 55 tahun. Ayahnya K.H. Abubakar bin K.H. Muhammad Sulaiman adalah pejabat Kepengulon Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar Penghulu Katib di Mejid Besar Kesultanan. Sedang ibunya, Nyai Abubakar, adalah putri K.H. Ibrohim bin K.H. Hasan yang juga pejabat Kepengulungan Yogyakarta. (Yusra, 2018). Tujuan dari Muhammadiyah adalah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad. Salah satu cara yang dilakukan Muhammadiyah untuk mensukseskan tujuannya yaitu dengan membuat lembaga pendidikan.

1. Ide Pembaharuan Pendidikan Muhammadiyah

Di Indonesia, hingga akhir abad ke-19 M, pola pendidikan dualistik masih berkembang, yakni sistem pendidikan kolonial dan sistem pendidikan Islam tradisional, seperti pondok pesantren. Kedua sistem pendidikan tersebut banyak mempunyai perbedaan yang mendasar, bukan hanya metode, tetapi juga dari segi kurikulum dan tujuannya. Di pondok pesantren siswa atau biasa disebut santri bebas untuk memilih bidang studi dan guru yang diinginkan. Sistem yang dipergunakan dua macam, yaitu sorogan dan bandongan atau wetonan. (Yusra, 2018).

Di Pondok Pesantren tidak ada sistem kelas, tidak ada ujian pengontrolan kemajuan santri, dan tidak ada batas waktu berapa lama santri harus tinggal di pondok pesantren. Sistem yang dipergunakan lebih menekankan hafalan, tidak merangsang santri untuk berdiskusi. Cabang-cabang ilmu yang diajarkan terbatas pada terbatas pada ilmu-ilmu agama dan yang berkaitan dengannya, hadis, musthalah hadis, fiqh, ushul fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu mantiq, ilmu falak, ilmu bahasa Arab, termasuk nahwu, sharaf, balaghah dan sebagainya.

Di lain pihak, Kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler, yang bertujuan untuk mendidik anak-anak priyayi untuk menjadi juru tulis tingkat rendah dan pemegang buku sebagai pegawai-pegawai yang dapat membantu majikan-majikan Belanda dalam tugas di bidang perdagangan, teknik dan administrasi. Jadi orientasi pendidikan itu hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah Belanda untuk tenaga-tenaga pembantu di kantor. Di sekolah ini para siswa tidak diperkenalkan sama sekali dengan pendidikan Islam, sehingga menjadikan corak berfikir dan tingkah laku lulusan-lulusannya (walaupun pada umumnya beragama Islam) jauh dari ajaran Islam. Selanjutnya, dengan bergulirnya kebijakan politik etis, lembaga sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda tidak hanya dikhususkan untuk orang Belanda atau orang Indonesia yang berasal dari kalangan priyayi saja, tetapi juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kebijakan politik etis mengakibatkan bermunculan lembaga pendidikan sekolah, mulai dari sekolah rendah hingga menengah.(Zaenudin, 2015). Pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan sekolah rendah yang dinamakan *Volkschool* (Sekolah Rakyat), dengan masa belajar selama 3 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan program *Vervolgschool* (Sekolah Lanjutan) dengan masa belajar selama 2 tahun.(Yusra, 2018).

Permulaan sekolah semacam ini lalu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya yang dinamakan *Meer Uitgebreid Leger Onderwijs* (MULO) yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada zaman Belanda dan program *Algemene Middelbare School* (AMS) yang jenjangnya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).(Ashraf et al., 1989).

Sesuai dengan landasan politik yang dijalankan, maka sekolah-sekolah tersebut juga mencerminkan arah politik pemerintahan kolonial Belanda, yaitu sekedar memenuhi kebutuhan tenaga atau pegawai terdidik.(Suminto, 1986). Karena itu, tidaklah aneh jika pendidikan yang dikelola pemerintah hanya menfokuskan pada pengetahuan (knowledge). Bahkan Ali mengatakan bahwa sistem pendidikan kolonial sangat bersifat individualistik dan kurang sekali memperhatikan asas-asas moral (Ali, 1964).

Maraknya pendidikan yang dikelola pemerintah kolonial Belanda dengan sendirinya melemahkan eksistensi lembaga pendidikan Islam tradisional, seperti pesantren. Lembaga pendidikan tradisional yang diharapkan mampu mengimbangi pendidikan pemerintah yang sekuler justru tidak berdaya. Kelemahan yang paling menonjol dalam pendidikan ini adalah sistem pendidikannya masih bersifat tradisional dan tidak teratur (Noer, 1980). Hal ini masih dibarengi dengan sikap konfrontasi kaum pesantren terhadap pemerintah kolonial yang berakibat munculnya perilaku eksklusif atau menutup diri dari pengaruh luar.

Pada permulaan abad ke-20, di kalangan muslim terpelajar Indonesia mulai muncul kesadaran baru untuk mengatasi kondisi pendidikan Islam Indonesia yang mengalami keterpurukan. Mereka terbuka dengan terhadap ide-ide dan pemikiran yang membawa pada perubahan dan kemajuan untuk menemukan solusi yang terbaik.

K.H. Ahmad Dahlan dan para pemimpin Muhammadiyah bertekad mengadakan pembaharuan pendidikan. Pembaharuan tersebut meliputi dua segi, yaitu cita-cita dan teknik. Dari segi cita-cita, ingin membentuk muslim yang berakhlak mulia, alim dalam agama, luas pandangan dan faham masalah keduniaan, yang kemudian menimbulkan ide intelektual-ulama dan ulama-intelektual, cakap dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Dengan demikian target yang ingin dicapai oleh setiap lulusan pendidikan Muhammadiyah meliputi: akidah yang benar, akhlak yang mulia, cerdas, trampil dan pengabdian masyarakat. Ahmad Jainuri menegaskan bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah berkeinginan mencetak elit muslim terdidik yang memiliki identitas Islam yang kuat, mampu memberikan bimbingan dan keteladanan terhadap masyarakat, dan sekaligus sebagai kekuatan yang mengimbangi tantangan kaum elit sekuler berpendidikan Barat yang dihasilkan oleh pendidikan Belanda pada waktu itu.(Jainuri, 1981).

Sedangkan dari segi teknik lebih banyak berkaitan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai cita-cita tersebut Muhammadiyah menyempurnakan kurikulum pendidikan Islam dengan memasukkan pendidikan

agama Islam ke sekolah umum dan pengetahuan sekuler ke dalam sekolah agama.

2. Gerakan Pembaharuan Pendidikan Muhammadiyah

Merealisasikan ide pembaharuan dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah telah melakukan aktifitasnya dalam bentuk mendirikan madrasah madrasah dan pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum dan modern, mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan kurikulum keislaman dan kemuhammadiyah. Lembaga pendidikan yang didirikan di atas dikelola dalam bentuk amal usaha dengan penyelenggaranya dibentuk sebuah majelis dengan nama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, secara vertikal mulai dari Pimpinan Pusat sampai ke tingkat Pimpinan Cabang. (Yusra, 2018).

Majelis Dikdasmen yang disertai tugas sebagai penyelenggaraan amal usaha di bidang pendidikan, dalam melaksanakan program mengacu kepada Tanfidz Keputusan Mukhtar, Tanfidz Keputusan Musyawil dan Tanfidz Keputusan Musda. Agar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah mempunyai acuan dan aturan yang jelas, Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mentanfidzkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari persyarikatan Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan, membina, mengawasi dan mengembangkan penyelenggaraan amal usaha di bidang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, majelis pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah harus mengacu kepada visi, misi, asas dan tujuan pendidikan Muhammadiyah. Amal usaha pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen tersebut adalah SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan Pondok Pesantren.

Terhadap sistem pondok pesantren, Muhammadiyah berusaha merubah bentuk lama dengan memperkenalkan organisasi dan administrasi dan cara-cara penyelenggaraannya. Untuk maksud tersebut Muhammadiyah mendirikan "Pondok Muhammadiyah" perguruan tingkat menengah pertama di Yogyakarta yang memberikana pelajaran ilmu agama dan ilmu umum bersama-sama. Pondok Muhammadiyah merupakan satu model pembaharuan pendidikan Islam yang menggabungkan unsur-unsur lama (dengan tetap mempertahankan Islam sebagai dasar) dan unsur-unsur baru (dengan mencontoh sistem pendidikan Barat dalam pelaksanaannya). Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1924, perguruan ini berubah menjadi Kweekschool Muhammadiyah dan pecah menjadi dua bagian yaitu Kweekschool Muhammadiyah Putri) yang kini dikenal dengan Madrasah Muallimat Muhammadiyah) dan Kweekschool Muhammadiyah Putra (yang kini dikenal dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah).

Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah pada tahap awal perkembangannya menggunakan kemas "sekolah umum" dengan menambahkan mata pelajaran Islam di dalamnya. Konsep ini sejalan dengan agenda Muhammadiyah untuk mendorong pengajaran dan pengkajian ajaran-ajaran Islam secara modern dengan sistem lembaga pendidikan yang modern pula. Hal ini juga sejalan dengan kritik reformis, termasuk Muhammadiyah di dalamnya, terhadap sistem pendidikan tradisional Islam. Mereka memandang bahwa sistem tradisional tidak memadai lagi dalam konteks perkembangan masyarakat muslim yang semakin modern.

Adapun mata pelajaran keislaman yang ditambahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah merupakan turunan dari ideologi keagamaan Muhammadiyah. Ortodoksi dan paham keagamaan yang bercorak salafi menjadi materi utama pada sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama pada periode awal. Doktrin dasar keislaman merupakan materi utama pada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Materi-materi penting dalam sekolah Muhammadiyah meliputi beberapa bidang berikut. *Pertama* bahasa Arab. Ini sejalan dengan gagasan kembali kepada “al-Quran dan Sunnah.” Teks suci alQur`an ditulis dengan bahasa Arab, oleh karena itu menjadi keniscayaan menguasai bahasa Arab. Materi bahasa Arab di sekolah-sekolah Muhammadiyah diberikan sejauh dapat membantu siswa mengakses teks suci al-Qur`an dan Sunnah.

Kedua, materi-materi tentang literatur keislaman seperti fiqh, ushul al-fiqh, dan tafsir. Hal ini bertujuan agar para siswa di sekolah Muhammadiyah mengenal dengan baik doktrin dasar keislaman sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan keagamaan pada masyarakat. Berkaitan dengan ini Muhammadiyah memberikan penekanan kepada dasar-dasar keislaman seperti eksistensi Tuhan, Malaikat, Nabi, kitab suci, hari akhir, qadha dan qadar, termasuk di dalamnya ritualritual keagamaan seperti sholat, puasa, membayar zakat dan haji. termasuk juga di dalamnya pengajaran tentang amar ma`ruf nahi munkar, sebuah perinsip yang sering didengungkan Muhammadiyah.

Ketiga, materi sejarah Islam. Sejarah terutama dilihat peranannya sebagai kekuatan yang meneguhkan keimanan dan membangkitkan semangat perjuangan. Materi sejarah dibagi menjadi dua area utama, yaitu sejarah Indonesia, dan sejarah Islam periode formatif.(Subhan, 2012).

Sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah mendapat sambutan baik dari masyarakat dan pemerintah. Dari masyarakat, seperti yang digambarkan oleh Nakamura, lewat penelitiannya di kota Gede, Yogyakarta, banyak orang dari kalangan luas yang memiliki orientasi keagamaan serta status sosial yang berbeda mengirim anak-anak mereka ke sekolah Muhammadiyah, termasuk beberapa dari keluarga, Dari pihak pemerintah, sekolah Muhammadiyah bahkan mendapatkan bantuan karena dianggap memenuhi syarat.(Yusra, 2018).

B. Nahdatul Ulama (NU)

Nahdlatul ulama didirikan pada tanggal 16 rajab 1344 H yang bertepatan dengan bulan Januari 1926 M di Surabaya. Pendirinya adalah alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur diantaranya K.H. Hasyim Asyari (TebuIreng), K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H Bisri (Jombang), K.H. Ridwan (Semarang), dan lain-lain.(Andewi, 2009).

Bangkitnya seorang ulama dan tumbuhnya suatu pesantren di masa lampau, agaknya harus melalui proses yang tidak gampang. Pada umumnya, harus dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan masyarakat umunya masyarakat pedesaan terhadap kelebihan di bidang ilmu agama (Islam), keshalihan perilaku maupun ketegasan serta keberanian seseorang ulama dalam menghadapi segala macam gangguan yang mengancam diri pribadi maupun lingkungannya. Dengan kelebihan itu, penduduk setempat kemudian banyak berdatangan untuk berguru dan memina diisi berbagai macam ilmu. Maka terjadilah proses belajar mengajar yang oleh masyarakat jawa diberi istilah tersendiri. Ulama yang mengajarkan ilmunya disebut kyai, sedangkan orang yang menuntut ilmu disebut santri.(Rakhman, 2021).

NU adalah perkumpulan sosial yang mementingkan pendidikan dan pengajaran Islam. NU mendirikan beberapa madrasah di tiap-tiap cabang dan ranting. Untuk mempertinggi akhlak budi pekerti mereka. Sejak masa pemerintahan Belanda dan penjajahan Jepang, NU tetap memajukan pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah serta mengadakan tabligh-tabligh dan pengajian-pengajian disamping urusan sosial yang lain, bahkan juga urusan politik yang dapat dilaksanakannya pada waktu itu.(Andewi, 2009).

Tujuan didirikannya NU adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnah wal jamaah* yang menganut salah satu dari mazhab empat, dan mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.⁸ Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:(Rakhman, 2021).

1). Di bidang agama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut *faham Ahlusunnah Wal Jamaah* dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. 2). Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa dan berbudi luhur berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. 3). Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil. 4). Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.

Pada akhir tahun 1356 H (1938 M) komisi perguruan NU telah mengeluarkan reglement tentang susunan-susunan madrasah-madrasah NU yang harus dijalankan mulai 2 Muharram 1357. Susunan madrasah-madrasah itu adalah sebagai berikut:(Asrohah, 1999)

- a. Madrasah awaliyah, lama belajar 2 tahun.
- b. MI, Lama belajar 3 tahun.
- c. MTs, lama belajar 3 tahun.
- d. Madrasah Mu'allimin Wustha, lama belajar 2 tahun.
- e. Madrasah Mu'allimin 'ulya, lama belajar 3 tahun.

Susunan madrasah dan sekolah NU sudah banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan. Ketika KH. Hasyim Asy'ari menjabat sebagai menteri agama ia mengambil keputusan untuk menyesuaikan diri dengan pendidikan Barat, yaitu dengan cara memasukkan pelajaran umum ke madrasah.(Asrohah, 1999).

Dalam perjalanan Sejarahnya NU pernah menjadi partai politik kemudian bergabung dalam partai Masyumi namun setelah partai-partai Islam difungsikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), NU kembali kepada fungsinya semula yaitu sebagai gerakan sosial keagamaan dengan semboyan kembali ke Khittah (kepada jiwa) pada tahun 1926. (Rakhman, 2021).

C. Persatuan Tarbiyah Islamiyah

Persatuan Tarbiyah Islamiyah adalah organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang menjadi kekuatan massa terbesar bersama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Cikal bakal Persatuan Tarbiyah Islamiyah adalah berasal dari organisasi Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PMTI) yang lahir di Candung, 5 Mei 1928 (Liswar & Naldi, 2020). Kelahiran Persatuan Tarbiyah Islamiyah di motivasi untuk menjaga dan mempertahankan kemapanan dari paham keagamaan ahl al-sunnah wa al jama'ah dan mazhab imam syafi'i yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat serta mencegah munculnya gejolak sosial akibat genjarnya gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau pada saat itu.(Koto, 2023).

Sejalan dengan modernisasi yang terjadi di Minangkabau Kaum Tua juga melakukan pembaharuan di berbagai bidang salah satunya di bidang pendidikan. Yakni dengan mengubah pola pendidikan yang awalnya berbentuk surau kemudian berubah menjadi madrasah yang mana di dalam sekolah madrasah ini mereka juga diajarkan ilmu tauhid dan ilmu agama lainnya. Salah satu sekolah madrasah yang dibentuk oleh Kaum Tua ialah Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau lebih dikenal dengan MTI salah satu pelopor MTI di Minangkabau.(Koto, 2023).

Pada hakikatnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) adalah organisasi kelompok kaum tua Minangkabau yang dalam bidang akidah mengikat diri pada paham AhlulSunnah Wal Jama'ah Ajaran Abdul Hasan al-Asy'ari dan Abu Muslim al-Maturidi, sementara dalam bidang ibadah mengikat diri kepada mazhab Syafi'.

Latar belakang didirikannya Persatuan tarbiyah Islamiyah tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah di Minangkabau. Munculnya Madrasah Islamiyah pun tidak bisa dilepaskan secara historis dari inisiatif syekh Abbas dengan menyurati syekh Sulaiman Arrusuli pada suatu hari di tahun 1926, seperti yang di ungkapkan oleh Alaidin Koto dalam bukunya: " Syekh Sulaiman Arrasuli (1878-1970) mengajar muridnya di Surau Baru, Canduang. Kira-kira pukul sepuluh pagi, sebelum pelajaran dimulai salah satu seorang muridnya yang senior datang menghadap dan menyerahkan sepucuk surat yang ia terima dari Syekh Abbas, Bukit Tinggi surat itu berisi saran syekh Abbas agar beliau, Syekh Sulaiman Arrasuli, bersedia mengubah sistem pengajaran menjadi Madrasah, seperti yang dilakukan oleh Kaum Muda.(Rusli & Muhtadi, 2021).

Selesai membaca surat tersebut, Syekh Sulaiman langsung memberitahukan murid-muridnya mengenai maksud surat itu dan sekaligus meminta tanggapan mereka atas saran yang di ajukan oleh Syekh Abbas. Ternyata saran tersebut di setujui dan mendapat sambutan hangat di kalangan murid-murid Syekh Sulaiman Arrasuli yang hadir dalam pengajian itu. Dengan antusias mereka meminta agar sang Buya dapat merealisasikan saran itu dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Di samping untuk membentuk sebuah organisasi, pertemuan itu dimaksudkan pula untuk merumuskan kesatuan pola dari madrasah-madrasah yang ada, baik nama maupun sistem pengajaran dan kurikulumnya. Pertemuan inilah yang melahirkan organisasi Pesatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk membina, memperjuangkan dan mengembangkan madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada.

1. Kegiatan-kegiatan PERTI Sebagai Organisasi Pendidikan

Mendirikan dan mengorganisir madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah khususnya Madrasah Tarbiyah Islamiyah dengan segala tingkatnya. Penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran ini dimulai dari

tingkat anak-anak sampai perguruan tinggi. Adapun tujuan dari sekolah-sekolah PERTI adalah untuk membentuk Insan Muslim yang berpengetahuan, berkecakapan, dan berketerampilan serta taat menjalankan hukum agama, dan untuk melahirkan ulama-ulama, mubaligh-mubaligh dan kader-kader bangsa yang islami, yang mampu menyebarkan, membela, dan mempertahankan agamanya disepanjang zaman dan tempat.

Membentuk Badan-Badan Studiefonds (BSF), yaitu badan-badan pengumpul dana, yang akan digunakan untuk membantu orang tua murid-murid yang kurang mampu, untuk melanjutkan sekolah anaknya. Mengadakan bermacam-macam kursus dengan berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan. Kursus tersebut dinamakan dengan Tarbiyatul Ummahat untuk kaum wanita, dan kursus handenarbeid untuk keterampilan. Membentuk organisasi kepanduan yang meliputi darat, laut dan udara dengan nama kepanduan Al-Anshan. Organisasi ini berdiri dan berkiprah selama 20 tahun. Di tanah air dalam sebuah wadah yang dinamakan PRAMUKA.

Membentuk organisasi pelajar, Persatuan Murid Tarbiyah Islamiyah (PMTI). Organisasi ini beberapa kali mengganti nama yaitu PEPINDO (Pendidikan Pemuda Islam Indonesia), dan juga pernah diganti dengan nama PTTI (Persatuan Pelajar Tarbiyah Islamiyah).

2. Pendidikan Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).

Pendidikan Islam di Minangkabau tidak pernah terlepas dari pendidikan Surau yang memakai system halaqah. Seiring berjalannya waktu system halaqah ini mengalami modernisasi ke system pendidikan klasik. Lahirnya MTI tidak terlepas dari modernisasi yang terjadi, seperti Surau Baru Canduang yang bersistem pendidikan halaqah menjadi system pendidikan klasik yang di pelopori oleh Syaikh Sulaiman Arrusuly dan dorongan dari para sahabatnya. (Rusli & Muhtadi, 2021).

Perubahan dari Surau Besi ke MTI Canduang diikuti juga oleh para sahabat Syaikh Sulaiman Arrusuly dengan merubah system halaqah pada suraunya menjadi system pendidikan klasik. Perubahan tersebut melahirkan sebuah organisasi PTI / PERTI yang menjadi wadah dari seluruh MTI-MTI yang ada di Minangkabau.

Dalam perkembangannya PERTI telah berperan penting dalam mengembangkan pendidikan Islam melalui Madrasah Tabiyah Islamiyah (MTI) yang ada di seluruh Sumatera. Seiring berjalannya waktu PERTI mampu berperan penting dalam mengembangkan pendidikan Islam melalui MTI-MTI yang di kelolanya. Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada tahun 1937 jumlah MTI di perkirakan lebih kurang dari 300 madrasah yang bertebaran di seluruh Sumatera.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, tidak lepas dari peranan tokoh ulama dan ormas Islam. Ide pembaharuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk kurikulum yang tidak hanya pelajaran agama, namun juga ada pelajaran pengetahuan umum. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu, metode pembelajaran juga terus mengalami perkembangan, mulanya hanya metode membaca kitab, kini sudah ditambah dengan metode-metode lain menyesuaikan keadaan saat ini. Integrasi ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Islam yang diasuh oleh organisasi-organisasi Islam telah berlangsung sejak kelahiran organisasi tersebut.

Para Tokoh Ulama' seperti K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asyari, K.H. Imam Az-Zarkasyi, Buya Hamka, Mahmud Yunus dan Organisasi Islam sangat berperan penting seperti diantaranya yang terbesar di Indonesia, Jami'at Khair, Al Irsyad, SDI (Syarikat Dagang Islam), lalu dilanjut dengan lahirnya Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Nahdatul Ulama (NU), Al Jami'atul Washliyah, dan Al Ittihadiyah. Salah satu bidang penting dari organisasi tersebut adalah bidang pendidikan. Semua organisasi Islam yang ada di Indonesia memaksimalkan pelaksanaan pendidikan dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan, seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, A. M. (1964). *Alam pikiran Islam modern di Indonesia*. Tintamas.
- Andewi, S. (2009). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ashraf, A., Nasr, S. H., & Siregar, S. (1989). *Horison Baru Pendidikan Islam*. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795641318400>
- Asrohah, H. (1999). *Sejarah pendidikan islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Basit, A., Desman, D., Zulmuqim, & Samad, D. (2023). Peran Ormas Islam Dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *AL-IBANAH*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i2.196>
- Jainuri, A. (1981). Muhammadiyah, gerakan reformasi Islam di Jawa pada awal abad kedua puluh. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271123157632>
- Koto, A. (2023). *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hJjfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Koto,++A.+\(2012\).+Persatuan++Tarbiyah++Islamiyah+Sejarah,Paham++Keagamaan++dan++Pemikiran+Politik+&ots=UTGpDsNo99&sig=E7eV-jUSyETVnX5kasC4VOvM0r8](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hJjfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Koto,++A.+(2012).+Persatuan++Tarbiyah++Islamiyah+Sejarah,Paham++Keagamaan++dan++Pemikiran+Politik+&ots=UTGpDsNo99&sig=E7eV-jUSyETVnX5kasC4VOvM0r8)
- Liswar, M., & Naldi, H. (2020). Majalah Soearti sebagai Media Massa Persatuan Tarbiyah Islamiyah(1937–1945). *Jurnal Kronologi*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.24036/jk.v2i4.58>
- Noer, D. (1980). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796000222464>
- Rakhman, S. (2021). Dinamika Perkembangan Politik Nahdatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999. *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 8–17.
- Rusli, R., & Muhtadi, F. (2021). Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Minangkabau pada Awal Abad XX. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2946>
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren madrasah sekolah*. Jakarta: Lp3es.

- Subhan, A. (2012). *Lembaga pendidikan Islam Indonesia: Abad ke-20*. Kencana. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KhZNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Arief+Subhan,+Lembaga+Pendidikan+Islam+Indonesia+Abad+ke-20+Pergumulan+antara+Modernisasi+dan+Identitas&ots=8L_044OWMi&sig=mYwx2c05DHdoYLkF2yMECx3faPE
- Suminto, H. A. (1986). Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche zaken. *(No Title)*. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000793939273472>
- Yusra, N. (2018). MUHAMMADIYAH: GERAKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/potensia.v4i1.5269>
- Zaenudin, L. (2015). Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 1–16.